

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDY KASUS NORMALISASI KALI BEBENG KABUPATEN MAGELANG)

Untung Setiyahadi*, Sukarmi**

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :
untungsetiyahadi42@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Thesis entitled Criminal Law Policy Against Minerals and Coal Mining Case (Case Study of Normalization of Kali Bebeng Magelang Regency). The issues to be investigated are: criminal law policy towards mining crime. What are the obstacles to Implementation of Law No. 4 of 2009. Legal policies and mining solutions. The purpose of this study: To know the criminal law policy against mining, Obstacles of implementation of Law Number 4 Year 2009 and criminal law policy on mining crime and its solution. The results of the study concluded that: Criminal policy on criminal acts in the field of mining in Law no. 4 Year 2009. With formulated CHAPTER XXIII Penal provisions (penal provisions) Article 158-165 in Minerba Act. Barriers that occur in the implementation of Law No. 4 of 2009. a. Limitation of minimum area of exploration, b. Divestment Obligation After 5 (Five) Years of Production Operation, c. Regulation is not neutral to the competition of the business. The government's authority to determine the production amount of each commodity per year per province. d. Priority to BUMN and BUMD, Obligation to use local and / or national companies, and prohibition of using affiliated companies. e. The limits of the maximum area of mining operations and the solution is the policy of mining.

Keywords: Criminal Law Policy, Mineral and Coal Mining Crime

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.¹

¹ Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009.

Kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.²

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, terdiri dari 175 Pasal dan XXVI Bab. Dalam konsideran menimbanginya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang lahir. Pertama, karena mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting. Karena mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batu bara secara mandiri, andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.³

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴

² M. Taufik, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013, hlm. 312.

³ H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan. 1, hlm. 55.

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 24-25.

Salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial.⁵ Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut socio political problem. Kejahatan merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁶

Marc Ancel pernah memberikan definisi mengenai kebijakan hukum pidana, yang dalam hal ini diungkapkan kembali secara singkat oleh Barda Nawawi Arief, "*penal policy*" dapat dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.⁷ Tepatnya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan Umum yang dirasa kebijakan hukum pidana dalam undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan nasional maupun internasional. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan minerba dalam UU Minerba terdapat dalam Pasal 158-165.

Atas pertimbangan sebagaimana terurai pada paragraf-paragraf diatas sangat menarik untuk dibicarakan terlebih diteliti mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) namun fokusnya pada tataran atau tahapan formulasi (penetapan pidana) sehingga diangkat judul penulisan hukum: "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Normalisasi Kali Bebeng Kabupaten Magelang)"

b. Perumusan Masalah

1. Apa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini?
2. Hambatan apa yang terjadi pada imlementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan apa solusinya?

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya: Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, *Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. 2004.

⁶ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 1995), hlm. 18.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Prenada Media Group, 2011), halaman 27

2. Pembahasan

a. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam Undang-Undang Minerba ini dikenal adanya 3 (tiga) jenis izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Untuk mendapatkan Izin Pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administrative. Dari sini jelas bahwa adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba yakni sebagaimana dimuat dalam pasal 158-165 jelas karena hukum administrasi mengundang hukum pidana untuk membantu menegakkan norma hukum administrasi yang ada. Sehingga Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi.

Mengacu pemahaman yang pada dasarnya meyakini bahwa Undang-Undang Minerba merupakan bagian dari hukum pidana administrasi. Sehingga wajar pula bila diketengahkan pandangan menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Hukum Pidana”, dapat dikatakan bahwa *hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi*. Jadi, merupakan bentuk “fungsionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi”⁸. Dengan demikian, Undang-Undang Minerba yakni BAB XXIII Ketentuan Pidana Pasal 158-165 hakikatnya sebagai perwujudan dari politik hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan norma hukum administrasi.

Dalam kesempatan ini yang dikemukakan Prof Barda adalah tepat. Mengapa dapat dikatakan tepat? Karena memang sesuai dengan hakikat hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Diana Halim Koentjoro, pernah mencoba menguraikan hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum pidana secara sederhana, bahwa antara hukum pidana dan Hukum Administrasi Negara sebenarnya dua-duanya terletak dalam bidang hukum publik. Namun, dalam hal hukum publik. Namun, dalam hal hukum administrasi negara, maka hukum pidana berfungsi sebagai “*hukprecht*” (hukum pembantu) bagi Hukum Administrasi Negara, artinya *setiap ketentuan dalam Hukum Administrasi Negara selalu*

⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15.

*disertai sanksi pidana agar ketentuan Hukum Administrasi Negara itu ditaati oleh masyarakat.*⁹

Dengan begitu, pemidanaan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba (juga Undang-Undang yang termasuk dalam hukum pidana administratif) didasarkan atas kepentingan Bangsa Indonesia sebagai pemilik *mineral rights* atas kekayaan alam yang telah dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa (*God Almighty has granted*), yang kemudian menimbulkan hak menguasai negara sehingga mengamanatkan kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (*regelendaad*), (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Nampaknya memang sudah jelas bahwa sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Minerba pada hakikatnya harus diletakan sebagai pembantu didalam mempertahankan norma hukum dalam undang-undang tersebut. Terlebih dengan pidana yang didudukan sebagai sarana terakhir. Dalam kesempatan ini, hemat penulis ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba dapat dikatakan sudah diletakkan sebagai *ultimum remidium*. Salah satu bukti yang dapat dinyatakan adalah bila Undang-Undang Minerba dilihat sebagai suatu system maka dengan diletakknya Bab XXII mengenai Sanksi Administrasi sebelumnya aturan pidana yang dimuat dalam Bab XXIII mengenai Ketentuan Pidana, ini menunjukan sanksi administrasi diutamakan lebih dahulu baru kemudian sanksi pidana.

Berdasarkan sampul berkas perkara No. Pol : SP. Sidik/ 1130/ XII/ 2016/ Ditreskrimsus dengan tersangka SAMODRO HERNOWO terkait Pasal 158 Subsider pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan sebagai berikut:

- Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Pasal 160

⁹ Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, hlm 21, Bogor

- (1) Pasal setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan sampul berkas perkara No. Pol : SP. Sidik/ 1130/ XII/ 2016/ Ditreskrimsus dengan tersangka SAMODRO HERNOWO terkait Pasal 158 Subsider pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Uraian secara singkat perkara :

1. Pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 petugas Dit Reskrimsus Polda Jateng telah melakukan penyelidikan dengan cara pengecekan perijinan lokasi tambang pasir milik CV Bumi Selaras yang berlokasi di tegalan turut Dusun Sumberrejo Desa Kaliurang Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, ditemukan adanya kegiatan penambangan pasir oleh satu unit exavator merek COBELCO warna hijau, yang sedang menaikkan muatan materialnya ke truk bak Nomor Polisi B-9257-FYV guna dijual.
2. Dari pemeriksaan terhadap dokumen perijinan CV Bumi Selaras, diketahui bahwa perijinan kegiatan tambang yang dimiliki berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 503 / IUP-EKS / 3308.5.40.80 TAHUN 2015 Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Bumi Selaras tertanggal 22 Juli 2015, untuk atas nama sdr SAMODRO HERNOWO, selaku Direktur CV BUMI SELARAS alamat Dusun Kesaran Rt 2-Rw 1 Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa IUP Eksplorasi sdr SAMODRO HERNOWO telah habis masa berlakunya per tanggal 22 Juli 2016, meskipun telah dipenuhi dan dilengkapi semua persyaratan pengajuan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi, sebelum habis masa berlakunya IUP Eksplorasi.
4. Atas kejadian tersebut, Sdr SAMODRO HERNOWO, selaku Direktur CV Bumi Selaras, patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum Primer melakukan usaha

penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK Subsider mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi.

5. Terhadap Sdr SAMODRO HERNOWO patut diduga telah melanggar Primer Pasal 158 Subsider Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Maka akibat perbuatan Sdr. SAMODRO HERNOWO yang melanggar Pasal 158 Subsider 160 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 dikenakan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

b. Hambatan Pada Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Batasan luasan minimal wilayah eksplorasi

Pasal 52 ayat (1) : Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

Pasal 55 ayat (1) : Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hectare

Pasal 58 ayat (1) : (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hectare

Pasal 61 ayat (1) : Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar

Pembatasan luasan wilayah minimal untuk eksplorasi yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan pasal 61 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat dengan menciptakan hambatan masuk ke dalam industri pertambangan mineral dan batubara. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang batasan minimal dan maksimal untuk IUP Eksplorasi yang dibedakan antara mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara.

2. Kewajiban Divestasi Setelah 5 (Lima) Tahun Operasi Produksi

Pasal 112 ayat (1) : Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Kewajiban divestasi setelah 5 (lima) tahun operasi produksi sebagaimana tercantum pada pasal 112 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 juga termasuk kebijakan yang berpotensi memberikan hambatan persaingan. Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang divestasi seharusnya memperhatikan jenis usaha tambang, karena masing-masing jenis usaha tambang memiliki waktu yang berbeda-beda untuk mencapai Break Event Point (BEP). Hal tersebut juga terkait dengan keuntungan yang hendak dicapai oleh pelaku usaha.

3. Regulasi tidak bersifat netral terhadap persaingan usaha

Suatu regulasi dapat bersifat netral terhadap persaingan usaha apabila didasari dengan alasan-alasan yang dapat diterima untuk mencapai suatu tujuan bersama. Seperti halnya UU Minerba yang mempunyai tujuan-tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009 (sebagaimana telah dituliskan pada paragraf 2 bagian analisa kebijakan dari paper ini).

4. Kewenangan pemerintah untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.

Pasal 5 ayat (3) : "Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi"

5. Prioritas kepada BUMN dan BUMD, Kewajiban menggunakan perusahaan lokal dan/atau nasional, dan larangan menggunakan perusahaan afiliasi.

Pasal 75 Ayat (3) : Badan Usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

Pasal 124 Ayat (1) : Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

Pasal 124 Ayat (2) " Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 126 Ayat (1) : Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan yang diusahakannya , kecuali dengan izin Menteri.

6. Batasan Wilayah wilayah maksimal operasi pertambangan

Pasal 53 : Pemegang IUP Operasi produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hectare

Pasal 56 : Pemegang IUP Operasi produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hectare

Pasal 59 : Pemegang IUP Operasi produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hectare

Pasal 62 : Pemegang IUP Operasi produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hectare

Peraturan yang tidak menetapkan batas bawah untuk luasan wilayah operasi pertambangan ini memungkinkan lahan yang sempit namun mempunyai cadangan yang ekonomis untuk diusahakan dapat tetap ditambah.

c. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dan Apa Solusinya

1. Faktor Kebijakan Hukum

Sesungguhnya sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa terdapat dilematis dalam kebijakan hukum terhadap kegiatan Mineral dan Batubara. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus ditegakkan, namun sebelum kebijakan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. Penambang skala kecil terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum, sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha.

2. Solusi Kebijakan Penegakan Hukum

a. PETI dan Kebijakan *The Greatest Happiness of The Greatest Number Principle*

The Greatest Happiness of the Greatest Number Principle merupakan prinsip yang dilekatkan dengan nama Jeremy Bentham seorang filsuf yang berpengaruh dibidang hukum, moral, dan politik. Menurut Bentham:

*“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign master, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened”*¹⁰

¹⁰ <http://news.liputan.com/read/2114455/tambang-emas-monterado-bengkayang-runtuh-18-orang-tewas> (diakses 6 Agustus 2015)

Berdasarkan pernyataan Bentham tersebut, alam telah menempatkan umat manusia dibawah kendali dua penguasaan, rasa sakit (*pain*) dan rasa senang (*pleasure*). Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya manusia lakukan, dan menentukan apa yang menunjukan , dan menentukan apa yang akan manusia lakukan. Standart benar dan salah di situ sisi, maupun sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada 2 (dua) kekuasaan itu.¹¹

b. Kebijakan Pidana sebagai Ulmimum Remedium

Sebagaimana dinyatakan oleh Hoenagels bahwa terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil Ultimum Remidium dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain¹² 1) jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional; 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya 3) Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan ppidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan; 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat 5) Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif; 6) Hukum pidana dalam halhal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan; 7) Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Adapun putusan terhadap tersangka SAMODRO HERNOWO berkas perkara No. Pol : SP. Sidik/ 1130/ XII/ 2016/ Ditreskrimsus terkait Pasal 158 Subsider pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan terdakwa SAMODRO HERNOWO bin Siswoyo (alm) selaku Direktur CV. Bumi Selaras terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Dengan sengaja melawan hukum Primer melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK Subsider mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi.*

¹¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, (Kitchen: Batoche Books, 2000), hlm. 15

¹² G. Pieter Hoenagels, *The Other of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, (Holland: Kluwer, Deventer, 1963), hlm.231

3. Penutup

Berpijak pada perumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan, maka adapun simpulan yang dapat di tarik dan dikemukakan, antara lain:

1. Kebijakan pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini di muat dalaam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan dirumuskan BAB XXIII Ketentuan Pidana (*penal provisions*) Pasal 158-165 dalam Undang-Undang Minerba merupakan wujud pelaksanaan tahap formulasi ini dipandang sebagai tahapan yang sangat penting dalam proses penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Hambatan yang terjadi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah :
 - a. Batasan luasan minimal wilayah eksplorasi
 - b. Kewajiban Divestasi Setelah 5 (Lima) Tahun Operasi Produksi
 - c. Regulasi tidak bersifat netral terhadap persaingan usaha
 - d. Kewenangan pemerintah untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.
 - e. Prioritas kepada BUMN dan BUMD, Kewajiban menggunakan perusahaan lokal dan/atau nasional, dan larangan menggunakan perusahaan afiliasi.
 - f. Batasan Wilayah wilayah maksimal operasi pertambangan
2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan solusinya adalah kebijakan pemedanaan pertambangan Mineral dan Batubara pun harus mengedepankan aspek nonpenal, melalui pembinaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief , 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Prenada Media Group.
- _____, 2010, *Kapita Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia.
- G. Pieter Hoenagels, 1963. *The Other of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Holland: Kluwer, Deventer.
- Jeremy Bentham, 2000. *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, Kitchen: Batoche Books.

Kementerian Energi dan Sumber Daya: Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, *Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. 2004.

M. Taufik, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Nestor Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013.

Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Bina Aksara.

Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.

Salim HS, 2004. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Internet

<http://news.liputan.com/read/2114455/tambang-emas-monterado-bengkayang-runtuh-18-orang-tewas>